BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif sosiologi politik, partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Dalam ilmu politik bisa disebut dengan suatu kelompok yang terorganisasi yang angota-angotanya mempunyai orientasi, nilai, cita-cita yang sama. Secara umum, tujuan dibentuknya partai politik adalah memperoleh kekuasaan politk dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional.untuk melaksanakan kebijakan–kebijakan mereka[1].

Gagasan untuk membuat partai politik pasca pemerintahan Presiden Soeharto merupakan salah satu dampak semangat reformasi yang sedang berlangsung. Dorongan ke arah sistem politik yang memiliki banyak partai sangat kuat sebagai reaksi terhadap pengebirian parpol di bawah rezim orde baru. Kendatipun pada masa sebelum reformasi sistem multi partai juga diakui tetapi dalam kenyataannya yang ada (Golkar, PPP dan PDI) tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai multi partai karena ketergantungannya pada negara dan ketidakmampuannya dalam melakukan kompetisi secara wajar dan adil untuk membentuk pemerintahan.

[1]Moh.Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hal.221

Dengan runtuhnya rezim Soeharto maka dimungkinkan perombakan menyeluruh terhadap sistem partai politik di negeri ini[2].

Lahirnya masa reformasi ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada taggal 21 Mei 1998, yang disebabkan oleh demonstrasi massa yang sangat besar yang menuntut perubahan dalam segala bidang termasuk bidang kebebasan politik, kebebasan pers serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme[3]. Presiden B.J.Habibie yang menggantikan Soeharto pada masa itu membuka peluang demokrasi yang begitu luas antara lain menjamin kebebasan pers serta membebaskan berdirinya partai-partai politik yang baru di Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di tahun 1998 terdapat 181 partai politik baru dan 48 dari jumlah tersebut dinyatakan sah untuk mengikuti pemilu tahun 1999. Menjelang tahun 2004 terdapat 268 partai politik di Indonesia dan hanya 24 saja yang bisa mengikuti pemilu.

Jumlah di atas sangat berbeda dengan masa orde baru yang hanya diikuti oleh tiga partai (PPP, PDI dan Golkar). Besarnya jumlah partai yang mengikuti pemilu jelas akan menambah nuansa dan tekanan persaingan. Adakalanya koalisi antar partai dibentuk untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan memperbesar kemungkinan untuk memenangkan pemilihan umum.

Pengunduran diri Presiden Soeharto membuktikan bahwa masyarakat muslim merupakan aspek yang berpengaruh dalam politik Indonesia. Pada masa reformasi, muslim masih tetap memainkan peran penting yang akan mewarnai

[2]P.K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 6
[3]Geoff Forrester, *Indonesia Pasca Soeharto* (Yogyakarta: Tajidu Press, 2002), hal. 335.

bentuk politik Indonesia. Munculnya Islam sebagai kekuatan politik berarti menegakkan Islam di arena politik[4].

Di antara maraknya partai- partai baru yang muncul pada masa reformasi ini, lahir pula partai-partai yang menamakan diri sebagai partai Islam. Pada masa ini tercatat kurang lebih 13 partai politik Islam yang telah berdiri, Namun hanya 8 partai yang mendaftar dan lolos seleksi untuk ikut dalam pemilihan umum 1999. Partai- partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Serikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) dideklarasikan pada 21 Mei 1998, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) didirikan 29 Mei 1998, Partai Umat Islam (PUI) pada tanggal 26 Juni 1998, Partai Bulan Bintang (PBB) tanggal 17 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) 20 Juli 1998, Partai Politik Islam Masyumi pada tanggal 28 Agustus 1998, dan Partai Persatuan (PP) tanggal 3 Januari 1999. Semua partai tersebut secara formal mencantumkan Islam sebagai asasnya, akan tetapi tidak satupun dari partai ini yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Disamping partai- partai di atas, lahir pula partai politik Islam yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)[5].

Partai Amanat Nasional berdiri pada tanggal 23 agustus 1998. Awal berdirinya Partai Amanat Nasional dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat(MARA), Salah satu organisasi gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeahrto, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) Muhamadiyah, dan

[4] Geoff Forrester, *Indonesia Pasca Soeharto* …, hal.337

[5]Kholid Novianto, *Era Baru Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 106.

kelompok Tebet. Asas Partai Amanat Nasional adalah Akhlak berlandaskan Agama yang membawa Rahmat bagi sekalian Alam.[6]

Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKB adalah partai politik yang didirikan di Jakarta, dan dideklarasikan di Cianjur, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Juli 1998. Partai kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sebagai wadah penyaluran aspirasi politik warga Nahdatul Ulama (NU) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Deklarator PKB adalah KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Muzadi, KH. Ilyas Ruchiat, KH. Moenasir Ali, dan KH. Mustofa Bisri. Sedangkan para pendirinya adalah sejumlah ulama, pengasuh pesantren, tokoh masyarakat, cendikiawan dan tokoh pemuda dan perempuan.[7]

Kelahiran PKB diawali dari banyaknya aspirasi kuat dari golongan Nahdlatul Ulama (NU) di antaranya mengenai perlunya pendidikan politik bagi warga NU agar tidak terus menerus dimarjinalisasi oleh pemerintah dan rezim penguasa seperti yang terjadi selama pemerintah orde baru. Banyak pendapat di kalangan warga NU yang menganggap bahwa posisi sebagai ”anak nakal terutama disimbolkan melalui figur KH. Abdurahhman Wahid (Gusdur) yang mengambil peran oposisi terhadap Soeharto.

Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, baik secara struktural maupun kultural, PKB mewarisi NU secara struktural. Dalam organisasinya PKB memiliki dua institusi, yaitu Dewan Syura sebagai institusi penentu kebijakan dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksanaan kebijakan partai. Hal ini persis bagaimana yang ada

[6]http//: mediapublikonline co.id di akses 10 Agustus 2017

[7]Saifullah Ma’sum, Mufid A. Busyari dan Syaiful Bahri Anshori, *Kader Penggerak Desa/ Kelurahan Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta : DPP PKB 2011), Cet. Ke-I. hal. 21

di NU yakni lembaga Syuriah dan Tanfiziah. Secara kulturalpun PKB mengembangkan sikap kemasyarakatan sebagaimana yang dikembangkan NU, yakni sikap kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan yang bersumber pada hati nurani, dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecah kan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wal wafa bil ahdi*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al'adalah*), tolong-menolong dalam kebijakan (*al-al'awun*), dan konsistensi menjalankan ketentuaan bersama (*al-istiqamah).*[8]

Berbicara tentang Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang terlahir dengan asas Islam ini, tidak begitu menunjukan eksistensinya di Bukittinggi, Hal ini terbukti dalam pemilu legislatif pada tahun 2014. Partai Kebangkitan Bangsa hanya mempereoleh satu kursi di DPRD Bukittinggi. Pada pemilihan legislatif saat itu Partai Kebangkitan Bangsa tertinggal jauh dari pemilih terbanyak yaitu partai Gerinda yang memperoleh empat kursi di DPRD, Sebagaimana dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 1

DATA CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BUKITTINGGI

PRIODE 2014-2019

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Beny Yusrial, S.IP	Ketua DPRD	Partai Gerindra
2	H. Trismon, SH	Wakil Ketua DPRD	Partai Golkar

[8]Hasyim Muzadi, *Membangun NU di Era Pasca Gusdur,* (Jakarta: Grasindo, 1999)

3	Yontrimansyah, SE	Wakil Ketua DPRD	Partai Demokrat
4	Muhammad Nur Idris, SH	Ketua Komisi I	Partai Amanat Nasional
5	H. Syaiful Efendi, Lc	Wakil Ketua Komisi I	Partai Keadilan Sejahtera
6	Dedi Patria, SH	Sekretaris Komisi I	Partai persatuan pembangunan
7	Jusra, S.Sos,	Anggota Komisi I	Partai Golkar
8	Hj. Nursyida, A.Ma,	Anggota Komisi I	Partai Demokrat
9	Farale Sijabat, SH	Anggota Komisi I	Partai PDI Perjuangan
10	Asri Bakar, SH	Anggota Komisi I	Partai Gerindra
11	Drs. Rismaidi, SH	Ketua Komisi II	Partai Persatuan Pembangunan
12	Herman Sofyan	Wakil Ketua Komisi II	Partai Gerindra
13	Andre Kresna Saputra	Sekretaris Komisi II	Partai kebangkitan bangsa
14	Arnis	Anggota Komisi II	Partai Keadilan Sejahtera
15	Ir. Hj. Aisyah	Anggota Komisi II	Partai Demokrat
16	Asril, SE	Anggota Komisi II	Partai Nasdem
17	Edison, SE	Anggota Komisi II	Partai Golkar

18	M. Syafri Syam	Anggota Komisi II	Partai Amanat Nasional
19	Rusdy Nurman	Ketua Komisi III	Partai Demokrat
20	Ibnu Asis	Wakil Ketua Komisi II	Partai Keadilan Sejahtera
21	Jon Edwar, ST	Sekretaris Komisi III	Partai Golkar
22	Uneva Haryanto, SH	Anggota Komisi III	Partai persatuan pembangunan
23	Deddi Moeis	Anggota Komisi III	Partai Gerindra
24	Fauzan Haviz	Anggota Komisi III	Partai Amanat Nasional
25	Zulius ST. Rajo Alam	Anggota Komisi III	Partai Hanura

Sumber:Data KPU Kota Bukittinggi Tahun 2014.[9]

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan wakilnya di DPRD kota Bukittinggi dengan persentase terkecil yaitu 4%, bersama dengan partai lain. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Data Persentase Anggota DPRD Kota Bukittinggi

PRIODE 2014-2019

NO	*FRAKSI*	*HITUNGAN*	*PERSENTASE*(%)
1	Partai Gerindra	$\frac{4}{25} \times 100\% = 16\%$	16%

[9] Data KPU Kota Bukittinggi Tahun 2014

2	Partai Golkar	$\frac{4}{25} \times 100\% = 16\%$	16%
3	Partai Demokrat	$\frac{4}{25} \times 100\% = 16\%$	16%
4	Partai Amanat Nasional	$\frac{3}{25} \times 100\% = 12\%$	12%
5	Partai Keadailan Sejahtera	$\frac{3}{25} \times 100\% = 12\%$	12%
6	Partai Persatuan Pembangunan	$\frac{3}{25} \times 100\% = 12\%$	12%
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	$\frac{1}{25} \times 100\% = 4\%$	4%
8	Partai Kebangkitan Bangsa	$\frac{1}{25} \times 100\% = 4\%$	4%
9	Partai Nasional Demokrat	$\frac{1}{25} \times 100\% = 4\%$	4%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	$\frac{1}{25} \times 100\% = 4\%$	4%
JUMLAH		25 Orang	100%

`

Dari tabel di atas bahwa Partai Gerindra,Partai Demokrat, dan Partai Golkar memperoleh 16% kursi, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 12% kursi, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 4% kursi di DPRD kota Bukittinggi.

Dari tabel di atas, dalam perolehan kursi di DPRD Bukittinggi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh kursi yang lebih kecil dibandingkan Partai

Islam yang lain. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti skripsi tentang“Keterwakilan Partai Islam Di DPRD Bukittinggi (Studi kasus DPC PKB Bukittinggi)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor apa yang menyebabkan minimnya keterwakilan partai Islam di DPRD Bukittinggi?
2. Bagaimana langkah Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan Partisipasi Politik di DPRD Bukittinggi?

C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab minimnya keterwakilan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan partisipasi politik di Bukittinggi.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Bukittinggi.
2. Dapat dijadikan pertimbangan bagi Partai Kebangkitan Bangsa dalam memberikan pengarahan partisipasi terutama bagi umat Islam di kota Bukitinggi.

3. Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang politik Islam bagi penyusun dan pembaca yang tertarik dengan pembahasan ini.

D .Penjelasan Judul

Untuk dapat memahami dan menghindari keraguan serta kesalahpahaman dalam memahami judul di atas, maka berikut akan dijelaskan tentang istilah-istilah yang dianggap perlu yang terdapat dalam judul sebagai berikut :

Keterwakilan : keterwakilan berasal dari wakil yang memiliki arti bahwa atau menunjukan utusan yang dipilih karena memiliki kemampuan untuk menjadi wakil.[10]

Partai Islam : Partai yang berideologi Islam, mengambil dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum Syari'ah Islam. Atau partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Partai Islam tidak diajukan untuk meraih suara dalam pemilu atau berjuang merih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem sekular menjadi sistem yang diatur oleh syariat Islam.[11]

DPRD : Dewan Perawakilan Rakyat Daerah disingkat (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah di provinsi/ daerah / kota di Indonesia. DPRD. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hal. 316

[11] Yusril Ihza Mahendra,*Modernisme Dan Fundemantalisme*(Jakarta: Paramedia 1999) hal. 90

18 ayat 3: pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.[12]

PKB : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai Nasionalis yang berasaskan Islam. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. PKB adalah partai politik yang didirikan di Jakarta, dan dideklarasikan di Cianjur, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Juli 1998.[13]

E. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[14]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan metode berfikir deskriptif,

[12]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPRD,dan DPD

[13]Saifullah Ma'sum, Mufid A. Busyari dan Syaiful Bahri Anshori, Buku Pedoman *Kader Penggerak Desa/ Kelurahan Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta : DPP PKB 2011), hal. 21

[14] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41.

penelitian ini berusaha menggambarkan “apa adanya” tentang variabel, gejala, keadaan, PKB di Bukittinggi.

2. **Lokasi penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi dan dilaksanakan di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Bukittinggi Jln. Umar Ghafar no.2 Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang kota Bukittinggi. Dan di kantor DPRD Jalan Khatib Sulaiman no. 7 Bukittinggi.

3. **Sumber data**

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

1. Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Bukittinggi.
2. Anggota DPRD terpilih dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Bukittinggi
3. HUMAS Partai Kebangkitan Bangsa Bukittinggi
4. Tokoh Masyarakat Bukittinggi

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab dengan responden.

b. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Seperti tulisan, gambar, atau karya-karya yang akan mendukung penelitian ini.[15]

5. **Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diinterpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah- langkah yang penulis lakukan:

a. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.

b. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

6. **Metode Analisis Data**

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[16]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.* Alfabeta, Bandung : 2010. H. 292-293. 240

[16] Lexy J. Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 190.

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

F. Sistematika penulisan

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan mudah dipahami, penulis perlu menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Bab pendahuluan ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Penjelasan Judul, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas tentang: 1. Partai politik Islam yang meliputi Pengertian Partai politik, Fungsi Partai Politik, Tipologi partai politik, Partai Islam yang meliputiPengertain Partai Islam, fungsi partai Islam, 2. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang meliputi pengertian Dewan Perwakilan Rakyat, fungsi dan weweng Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab III Hasil Penelitian. Yang meliputi: Gambaran Umum Tentang Partai Kebangkitan Bangsa, faktor minim keterwakilan Partai Kebangkitan

Bangsa di DPRD Bukittinggi dan upaya yang di lakukan Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan partisipasi politiknya di DPRD Bukittinggi.

Bab IV Penutup. Sebagai pencapaian kesimpulan dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini di cantumkan Kesimpulan dan Saran-saran.

Bab II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Partai Politik Islam

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan gabungan dari dua kata yaitu partai dan politik yang telah diserap kedalam bahasa Indonesia. Demi terarahnya tulisan ini, Penulis akan menjelaskan pengertian partai politik secara mendatail.

Dalam perspektif sosiologi politik, partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang-orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Adapun dalam ilmu politik istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama.[17]

Menurut para ahli partai politik adalah :

a. R. H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
b. Simund Neuman, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat

[17]A.A Said Gatara, dkk, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 221

atas dasar suatu persaingan dengan golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.[18]

Dalam tatanan bahasa Inonesia partai politik merupakan suatu istilah yang telah dirumuskan dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 dalam ketentuan umum menyebutkan partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[19]

Salah satu pakar politik yaitu Miriam Budiarjo mendefenisikan, Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materil.[20]

Berdasarkan beberapa definisi di atas partai politik adalah organisasi aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

2. Fungsi partai politik

[18]A.A Said Gatara, dkk, *Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian…*, hal. 161-162

[19]UU No 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

[20]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),hal. 161

Setiap keberadaan lembaga politik, termasuk partai politik, tentunya memiliki fungsi politik, Fungsi partai politik akan berbeda satu sama yamg lain, khususnya dalam hal kepentingan, apabila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Namun demikian, secara umum, Fungsi utama partai politik dimanapun adanya adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Berkenaaan dengan beragamnya fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo ada perbedaan fungsi partai politik dalam negara demokratis dan negara berkembang.

Partai politik dalam negara demokratis menyelengarakan beberapa fungsi:

a. sosialisasi politik, yaitu pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota msyarakat. Melalui proses sosislisasi politik inilah, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
b. Pendidikan politik, yaitu proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat. Di sini, para anggota masyarakat di harapkan menjadi senatiasa melihat politik.
c. Partisipasi politik, yaitu mengajak atau mengikutsertakan para anggota masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam dan tingkatan kehidupan politik.
d. Agregasi kepentingan, yaitu sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat melalui penampungan dan mengkombinasikan tuntutan–tuntutan individu dari para anggota masyarakat menjadi proposal kebijakan public yang signifikan.

e. Rekrutmen politik, yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan politik[21].

Partai politik untuk negara berkembang, memiliki tiga fungsi pokok, yakni meyediakan:

a. Dukungan basis masa yang stabil
b. Sarana inttegrasi dan mobilisasi
c. Memelihara kelangsungan kehidupan politik.[22]

Fungsi-fungsi partai politik di atas bila ditinjau dari sudut tingkatan dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan:

a. Di tingkatan masyarakat secara keseluruhan, partai politik memiliki fungsi sebagai sebuah mekanisme umum yang berusaha menangani konflik yang terjadi di masyarakat.
b. Di tingkatan sistem politik, partai politik memiliki fungsi sebagai institusi yang berfungsi memformulasikan kebijakan publik.
c. Di tingkatan kehidupan politik, partai politik memiliki fungsi utama dalam rekrutmem politik bagi kandidat-kandidat terpilih agar jabatan-jabatan publik dapat memenuhi fungsi dari partai politik.[23]

Partai politik mempunyai peran strategis dalam pembangunan demokrasi. Sukarna mengutip dari May Rudy menyebutkan enam fungsi partai politik:

a. Komunikasi politik dan penyaluran aspirasi rakyat.
b. Pendidikan dan pemasyarakatan politik kepada rakyat.

---

[21]A.A Sahid Gantara,*ilmu politik memahami dan menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia ,2008)hal.198

[22] Leo Agustino, *perihal ilmu politik: sebuah bahasa memahami ilmu politik*, hal 104

[23]A.A Sahid Gantara,*Ilmu Politik: memahami dan menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia ,2008)hal.199

c. Membina calon-calon pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum.
d. Penanggulangan konflik politik melalui cara-cara damai.
e. Melaksanakan pemerintahan.
f. Mengawasi pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan. [24]

Adapun fungsi dari partai politik menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luar agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
d. Partisipasi warga negara Indonesia.
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian partai politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jadi beberapa rumusan di atas dapat diambil fungsi utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan eksistensi dalam bentuk kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi partai.

3. Tipologi partai politik

Tipologi politik, yaitu tipe-tipe atau jenis –jenis partai politik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di sini, tipologi atau tipe-tipe partai politik

[24] Sukarna, *Sistem Politik di Indonesia*, (Bandung:Offset Alumni,1979), hal.14

dapat dibedakan dari tiga dasar kriteria, yaitu asas orientasi, komposisi fungsi basis sosial dan tujuan.

a. Dari asas orientasi partai politik dapat di kelompokan menjadi dua tipe yaitu:

1) Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiaatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan idiologi tertentu.

2) Partai politik doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideologi.[25]

b. Berdasarkan komposisi fungsinya, partai politik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu partai massa atau partai lindungan dan partai kader.

1) Partai massa adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara mobilisasi sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, pemilihan umum dapat mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat terpelihara. Selain itu, masyarakat dapat mobilisasi untuk mendukung dan melaksankan kebijakan tertentu.

2) Partai Kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, kedekatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.[26]

Jadi berdasarkan komposisi partai massa dan partai kader yaitu di dalam partai sama-sama mengandalkan anggota dalam mengembangkan fungsi partai sebagai penggerak mobilisasi untuk mendukung kebijakan-kebijakan partai.

[25]S.Toto Pandoyo, *Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi,* (Yogyakarta : Liberty, 1985), hal. 78

[26] S.Toto Pandoyo, *Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*…,hal. 79

c. Berdasarkan basis sosial dan tujuannya, partai politik dapat di golongkan pada empat tipe:

1) Partai politik yang beranggotakan lapisan–lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menemgah dan bawah.
2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
3) Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Hindu dan Budha.
4) Partai politik yang anggotanya berasal dari budaya tertentu seperti, suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.[27] .

Jadi berdasarkan dari beberapa tipologi partai politik dapat diambil kesimpulan bahwa tipe-tipe politik hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, karena partai politik mempunyai beberapa bentuk dan fungsinya dalam menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

4. **Partisipasi partai politik**

a. Pengertian partisipasi politik

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dan *capere*, yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil

[27] A.A Sahid Gantara,*ilmu politik:memahami dan menerapkan*…,hal.201

bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.[28]

Untuk memperjelas konsep dari partisipasi politik para ahli merumuskan beberapa rumusan tentang pengertian partisipasi politik sebagai berikut :

1) Huntington dan Nelson, Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.[29]
2) Michael Rush dan Philip Althoft, Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Indikatornya adalah berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.[30]
3) Herbert McClosky, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.[31]
4) Kevin R. Hardwick, Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Indikatornya adalah terdapat

[28]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),hal. 177

[29]Elly M. Setiadi, *pengantar sosiologi politik*, (Jakarta :Kharisma Putra Utama 2013) hal.127

[30]A.A Sahid Gantara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*…,hal 90

[31] A.A Sahid Gantara,*Ilmu Politik:Memahami Dan Menerapkan*…,hal.91

interaksi antara warga negara dengan pemerintah dan terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.[32]

5) Ramlan Surbakti, Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Indikatornya adalah keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara biasa.[33]

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik tersebut. Jadi partisipasi adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

b. Tipologi partisipasi politik

Menurut Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson menetukan bentuk-bentuk tipologi partisipasi politik yang meliputi:[34]

1) Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan untuk pasangan calon, atau tiap tindakan yang bertujuan mmpengaruhi hasil proses pemilihan.

[32]A.A Sahid Gantara,*Ilmu Politik:Memahami Dan Menerapkan*…,hal. 91
[33]A.A Sahid Gantara,*Ilmu Politik:Memahami Dan Menerapkan*…,hal. 92
[34]Damsar, *pengantar sosiologi politik* (Jakarta: Prenada Media Grup 2010) hal. 188

2) Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. seperti kegiatan yang di tunjukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu legislatif atau keputusan administratif tertentu.
3) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4) Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang di tujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang.
5) Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefnisikannya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. [35]

Partisipasi politik selain dilihat dari definisi dan bentuk juga dapat dilihat dari tipologi dan model.

1) Dari sisi tipologi, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori parisipasi aktif yaitu mengajukan usul mengenai kebijakan umum yang berlainan dengan kebijkan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan,

[35]Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik,* (Jakarta : Kencana Media Group, 2012) edisi revisi, hal. 188-189

membayar Pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiab keputusan pemerintah.

Partisipasi politik aktif menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang berorientasi output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk kategori partisipasi politik aktif maupun partisipasi pasif. Kelompok ini muncul didasarkan pada pandangan mereka yang mengangap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang merka cita-cita kan. mereka tersebut sebagai kelompok golongan putih.[36]

2) Partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah dapat di bedakan menjadi empat model :

a) Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cendrung aktif.
b) Apabila kesadaran politik dankepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi poltik cendrung pasif tertekan (apatis).
c) Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi cendrung militan radikal.
d) Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi partisipasi poltik cendrung tidak aktif.[37]

---

[36] . Michael Rush & Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 121-122

[37]Moh.Dzulkiah Said, *sosiologi politik,* (Bandung : Pustaka Setia, 2007) hal.99

Bentuk partisipasi politik seseorang nampak dalam aktifitas politiknya, bentuk partisipasi yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting)* untuk memilih para calon rakyat dan memilih kepala negara.

Bentuk Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat bersifat aktif, dapat pula bersifat pasif. Partisispasi aktif bila orang-orang yang bersangkutan menduduki jabatan- jabatan tertentu dalam suatu organisasi politik, memberikan dukungan keuangan, atau membayar iuran keanggotaan. Hal-hal ini tidak perlu dilakukan oleh mereka yang berpartisipasi secara pasif. Bentuk partispasi yang lain ialah mengikuti rapat umum demonstrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik, atau kelompok kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi semacam ini bisa bersifat spontan, tetapi seringkali karena diorganisir oleh partai politik atau kepentingan untuk memenuhi agenda politik mereka masing-masing.[38]

Tipologi partisipasi politik merupakan suatu upaya mengambil keputusan kebijakan yang dibuat pemerintah dan pemimpin dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persolalan masyarakat banyak.

5. Partai Islam

a. Pengertian Partai Islam

Partai politik Islam secara global dapat dipahami sebagai bagian dari partai politik pada umumnya, hanya saja ia membatasi dirinya pada pendasaran penggalian ide-ide politik pada sumber pokok Islam yakni al-quran dan Sunnah

[38] Rafael Raga Maran, *pengantar sosiologi politik*(Jakarta: PT Rineka Cipta 2001)hal.148

sehingga peranan wahyu di sini nampak mendapatkan posisinya. Hal ini yang membedakan antara partai politik Islam dan partai politik umum.

Partai politik Islam adalah suatu kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakan Islam (al-Qur'an dan sunnah) sebagai dasar dan garis perjuangan untuk menyampaikan aspirasi, maupun ide dan cita-cita umat Islam suatu negara.[39]

Berdasarkan hal tersebut, partai politik Islam adalah partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Partai politik Islam tidak ditujukan untuk meraih suara dalam pemilu atau berjuang meraih kepentingan sesaat, melainkan partai yang berjuang untuk merubah sistem sekular menjadi sistem yang diatur oleh syariat Islam. Partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam, karena partai politik Islam yang ideologis memiliki beberapa karakter di antaranya:

1) Dasarnya adalah Islam
2) Orang-orangnya adalah oraang yang berkepribadian Islam
3) Memiliki pemimpin menyatu dengan pemikiran Islam dan dipatuhi selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah
4) Memiliki konsepsi yang terkait berbagai hal
5) Mengikuti metode yang jelas dalam perjuangan sebagaimana yang di lakukan Nabi SAW.[40]

Perkembangan partai Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

[39]Ahmad Hakim, *Politik Bermoral Islam* (Yogyakarta :FH UII Press,2007) hal.46
[40] http//:hizbut-tahrir.or.id Partai Politik dalam Islam..,Di akses 10 agustus 2017

1) Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Liberal

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 atau tepatnya pada tanggal 3 November 1945, wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah tentang hak hidup partai-partai politik Indonesia. Partai-partai tersebut diharapkan sudah berdiri sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Pada saat inilah, setelah Partai Nasionalis Indonesia didirikan, partai muslim bernama Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) didirikan pada tanggal 7 November 1945.[41]

Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Partai yang ikut dalam pemilihan tersebut 28 partai politik dari berbagai aliran dan berbagai ideologi. Pada pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia hanya ada empat partai politik yang secara nasional keluar sebagai pemenang yaitu PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia), NU (Nahdatul Ulama) dan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Pemilihan umum 1955 diikuti oleh beberapa partai. Kemenangan pada pemilu 1955 diraih oleh PNI dan Masyumi, masing-masing mendapatkan 57 kursi. NU mendapatkan 45 kursi dan PKI berada setelah NU dengan perolehan 39 kursi, sementara partai-partai lainnya memperoleh kursi berkisar antara 1 sampai 8 buah kursi. Tambahan lainnya terlihat pada PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) sebanyak 4 kursi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) masing-masing 3 kursi. IPKI (Partai Ikatan

[41]Inu Kencana Syafiie, *Al-Quran dan Ilmu Politik…*, hal. 121

Pendukung Kemerdekaan Indonesia) 4 kursi, GPPS (Gerakan Pembela Pancasila) 2 kursi, PRI (Partai Rakyat Indonesia) dan PPPRI (Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia) juga masing-masing 2 kursi.[42].

Pada masa demokrasi liberal partai politik Islam mengawali pemilihan umum dengan baik, itu terbukti dengan partai Islam menduduki 57 kursi. Pada masa ini adalah awal terbentuknya atau munculnya partai Islam di Indonsia.

2) Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan kabinet yang baru untuk menggantikan kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda adalah peralihan dari periode demokrasi parlemen ke demokrasi terpimpin. Dalam kabinet Soekarno ini, anggota kabinet Djuanda tetap diberi posisi penting sebagai menteri yang tugasnya tidak banyak bedanya dengan tugas perdana menteri. Kabinet kerja inilah yang bertugas melaksanakan gagasan Soekarno dalam bentuk demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin dalam prakteknya adalah sistem politik dengan baju demokrasi tetapi minus demokrasi, mengapa semua ini terjadi, salah satu penjelasannya dapat dilihat atau ditelusuri dalam praktek politik pada demokrasi liberal ketika partai-partai berkuasa, sehingga kepentingan negara secara keseluruhan sering terlantar. Barangkali sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memang harus melalui proses jatuh bangun dalam uji coba sistem demokrasi. [43]

---

[42]M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 121

[43]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin,(1959-1965)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), cet. 1, hal.47

Pada masa demokrasi terpimpin, pengaruh Presiden Soekarno pada waktu itu sangat besar, selama beberapa tahun menjelang peristiwa 30 September/PKI tahun 1965, gelanggang politik Indonesia di pegang Soekarno, bersama militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI), Hal ini antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan partai politik yang berjumlah banyak, membendung percekcokan antara sesama mereka, yang akhirnya menimbulkan ketidakstabilan politik. Penyebab lain adalah karena keinginan Soekarno untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik, bukan sekedar lambang seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di samping itu karena keinginan tokoh militer untuk berperan dalam politik yang disebabkan semakin menurunnya kepercayaan mereka terhadap partai politik atau politisi sipil dalam menjalankan roda pemerintahan.[44]

Berdasarkan hal di atas, pihak liga muslimin (NU, PSII dan Perti) makin lama mengendor sikap politiknya, terhadap *move* Soekarno, sebaliknya Masyumi yang sudah mulai terpencil tetap saja meneruskan perlawanan terhadap gagasan dan pelaksanaan demokrasi terpimpin.[45]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami pada masa demokrasi terpimpin partai politik Islam selalu terpojok oleh penguasa, terutama Masyumi yang selalu berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah. Juga dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik Islam yang berperan dan berpartisipasi dalam kancah perpolitikan pada masa demokrasi terpimpin adalah Masyumi, NU, PSI dan Perti.

---

[44]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin..*, hal.139

[45]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin* , hal.140

3) Partai Politik Islam Pada Masa Orde Baru

Ditinjau dari konteks manapun, runtuhnya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru tetap merupakan persoalan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu hal yang relevan untuk ditinjau adalah dampak perubahan pemikiran ekonomi dan sosial politik masyarakat sebagai akibat lahirnya Orde Baru.[46]

Pada awal pemerintah orde baru masih banyak partai-partai peninggalan Orde Lama yang berkembang, bahkan partai yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno seperti Masyumi ingin direhabilitasi. Dengan tujuan membangun politik, akhirnya pemerintah Orde Baru melakukan pembinaan kehidupan kepartaian yang diwujudkan melalui fusi (penyederhanaan partai).[47]

Dengan diberlakukan fusi oleh pemerintah Orde Baru, maka partai-partai politik Islam digabungkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara partai katolik dan partai selain berideologi Islam dibekukan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai politik Islam pada masa pemerintah Orde Baru terbagi dua fase yaitu fase sebelum fusi dan fase sesudah fusi.

a) Partai politik Islam pada fase sebelum fusi adalah Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (PARMUSI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Tarbiyah Islamiyah (PERTI)
b) Partai Politik Islam pada fase sesudah fusi hanya terdiri satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Setelah berlangsung pemilu 1971 yang ditandai dengan kemenangan mutlak atas Golkar, pemerintah Orde Baru semakin

[46]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin ….,*hal. 124

[47]Syaiful Fatah, *Penghianatan Ala Orde Baru*, (Bandung : PT Remaja Roda Karya, 2000), cet. Ke-1, hal. 194

meningkatkan upaya penyederhanaan partai politik. Pemerintah menghimbau seluruh partai politik, supaya melakukan penyederhanaan sistem kepartaian.

PPP dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan gabungan dari empat partai politik Islam (NU, PSII, PERTI, PARMUSI) Penggabungan beberapa partai ini berarti menyatukan hak politik partai politik Islam dalam satu wadah yaitu PPP. Dengan demikian pada masa Orde Baru partai Islam hanya ada satu, yaitu PPP karena partai Islam yang lain di lebur kedalam PPP.[48]

4) Partai Islam Pada Masa Reformasi

Tumbangnya Presiden Soeharto menandai kemunculan Reformasi. Istilah ini menjadi sangat dikenal di seluruh masyarakat yang dianggap sebagai penyelamat kehidupan mereka, bahkan dianggap segala-galanya. Ia muncul sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi yang berdampak kepada semakin beratnya beban hidup masyarakat.[49]

Lahirnya Masa Reformasi ditandai dengan tumbangnya Pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang disebabkan oleh demonstrasi massa yang sangat besar yang menuntut perubahan dalam segala bidang termasuk bidang kebebasan politik, kebebasan Pers serta pemberantasan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme. Presiden B.J.Habibie yang menggantikan Soeharto pada masa itu membuka keran demokrasi dengan seluas-luasnya yaitu dengan membuka dan menjamin kebebasan Pers serta membebaskan berdirinya partai-partai politik yang

[48]Khaidir, *Menuju Partai Advokasi*, (Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa 2005) hal. 44

[49]Syaiful Fatah, *Penghianatan Ala Orde Baru*…., hal. 129-131

baru. Era baru ini disambut dengan gegap gempita dengan tuntutan perubahan-perubahan radikal dalam politik.

Kebijakan Presiden B.J.Habibie yang membebaskan berdirinya partai politik itu, disambut dengan lahirnya ratusan partai politik baru di Indonesia yaitu paling tidak 181 partai politik, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilu yang dipercepat pada bulan Juni 1999. Dalam pemilu pertama masa reformasi itu, tidak seluruh partai politik yang terdaftar bisa ikut pemilu, karena setelah dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pemilu tersebut hanya diikuti oleh 48 partai Politik. Pemilu ini, dianggap sebagai pemilu paling demokratis yang dilasanakan oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya setelah Pemilu pertama pada tahun 1955. Dari seluruh partai politik peserta pemilu tersebut paling tidak terdapat 7 partai politik Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan, Partai Nahdatul Ummat, Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Ummat dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Hasil Pemilu tahun 1999, menunjukkan bahwa ternyata perolehan partai politik Islam sangatlah kecil dibanding dengan perolehan suara partai politik yang tidak berdasarkan Islam. Partai Persatuan Pembangunan yang telah berumur hampir ¼ abad hanya memperoleh 58 kursi DPR yaitu 12,6 % dari 462 kursi yang diperebutkan. Partai Bulan Bintang memperoleh 13 kursi atau 2%, Partai Keadilan memperoleh 7 kursi atau 1,5%, Partai Nahdatul Ummah memperoleh 5 kursi atau 1%, serta 3 partai Islam lain yang meperoleh masing-masing 1 kursi, yaitu Partai

Kebangkitan Ummat, Partai Syarikat Islam serta Partai Masyumi sehingga berjumlah 3 kursi atau 0,64 %.[50]

Sementara itu, kedua partai yang berbasiskan massa Islam, memperoleh kursi yang juga tidak begitu besar, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 51 kursi atau 11% dan Partai Amanat Nasional memperoleh 34 kursi atau 7,36 %. Sehingga total perolehan kursi kedua partai ini adalah 85 kursi atau 18,36%. Jumlah ini seimbang dengan perolehan kursi partai-partai Islam. Sedangkan total perolehan kursi partai Islam dan partai berbasis massa Islam adalah 171 kursi atau 37 %.[51]

Peranan dan kedudukan parlemen hasil pemilu tahun 1999 menempati posisi yang sangat strategis bagi masa depan Indonesia, karena dalam masa inilah kebijakan-kebijakan strategis dan mendasar bagi masa depan Indonesia diletakkan antara lain dengan adanya perubahan yang sangat besar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada sisi lain, jika menyangkut politik praktis dalam hal penentuan dan pemilihan kepemimpinan, partai-partai Islam dan partai yang berbasiskan massa Islam dapat bersatu dan memiliki pandangan yang sama. Hal ini dapat dilihat pada saat terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Hal ini juga nampak pada proses politik dan berbagai pengambilan keputusan mengenai penentuan pejabat publik oleh DPR, hampir dapat dipastikan bahwa partai-partai tersebut dapat bersatu dan memiliki pandangan yang sama.

[50]Miftah Thoha, *Birokrasi dan Pemilihan Umum Di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media Group) hal.126

[51] Deliar Noer, *Partai Politik Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1987) hal. 57

Gejala ini menunjukkan adanya sikap pragmatis para politisi Islam di parlemen dalam berpolitik.[52]

Masa Reformasi awal runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto, akibatnya dalam pemilu pertama terjadi banyak bermunculan partai baru di Indonesia termasuk partai Islam. Tetapi pada masa tersebut partai Islam belum menunjukkan perolehan suara yang menjanjikan, partai Islam hanya menduduki total 85 kursi. Ini adalah bukti di karenakan kurang minatnya masyarakat kepada partai Islam.

B. Fungsi Partai Islam

Adapun fungsi dan peran dari partai politik Islam pada dasarnya sama dengan partai politik umum lainya yaitu sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

Masyarakat yang beragam akan menyebabkan perbedaan pendapat atau aspirasi masing-masing individu. Cara yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi masyararakat yang sama. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*).[53]

Disamping pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, Partai politik juga harus menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah

[52]http://hamdanzoelva.wordpress.compartai-politik-islam-dalam-peta-politik-indonesia di kutip 20 juni 2017

[53] Deliar Noer, *Partai Politik Islam di Pentas Nasional* ….., hal 54

kepada masyarakat. Dengan itu terjadi arus komunikasi informasi dari atas ke bawah dimana peran partai politik merupakan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

   Di dalam ilmu politik diartikan sebagai proses memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses politik berjalan secra berangsur-angsur. Pada fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, Partai politik harus berusaha menciptakan citra baik kepada masyarakat dan menunjukan bahwa partai politik telah memperjuangkan kepentingan mayarakat umum. Partai politik juga berperan mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

3. Partai politik sebagai rekrutmen politik

   Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam sebagai anggota partai. Partai politik dalam merekrut anggotanya mengunakan beberapa cara , di antaranya dengan melalui kontak pribadi atau mengadakan pemberitahuan.

   Partai politik juga berusaha menarik golongan-golongan muda untuk dididik menjadi kader partai politik yang kemudian di masa mendatang menggantikan pimpinan partai politik untuk mencari generasi-generasi baru yang akan menjadi andalan partai politik masa depan.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, Partai politik berusaha untuk mengatasinya, Partai politik dalam fungsinya sebagai sarana pengatur konflik berada di tengah-tengah kelompok yang bertikai. Partai politik menjadi mediasi dalam penyelesaian konflik.[54]

Namun sangat disayangkan dalam prakteknya, fungsi-fungsi partai politik tersebut tidak dapat terlaksanan dengan baik. Informasi yang diberikan seringkali meresahkan masyarakat. Partai politik juga lebih mementingkan kepentingan partai, bukan kepentingan nasional. Bahkan partai politik tidak dapat menyelesaikan konflik, akan tetapi malah memperpanjang konflik yang ada.

B. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga yang disebut parlemen, berasal dari kata *parle* yang berarti berbicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat artinya setelah mengartikulasikan meagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yangberkuasa. DPR di bentuk di pusat untuk mengkritisi pemerintah pusat, di bentuk di daerah untuk mengkrtisi pemerintah baik provinsi maupun kota.[55]

Indonesia mempunyai suatu perwakilan rakyat yang hanya terdiri dari satu badan saja, yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dari pada DPR (juga disebut Parlemen), pada umumnya ialah, memelihara/menjaga, memajukan kepentingan rakyat, serta membantu/mengawasi pemerintah. Selain itu DPR

[54]Arskal Salim, *Partai Islam Dan Relasi Agama Negara* ,(Jakarta : Pusat Penelitian Jakarta,1999) hal .8

[55] C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia,* (Jakarta : Aksara Baru, 1985), hal.254

membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Menurut Undang- Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden memegang kekuasaan Legislatif. Kedudukan dewan ini kuat sehingga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dan sebaliknya Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Pasal 19 ayat (1) menetapkan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang.

Anggota DPR direkrut dengan cara dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan konstitusi Indonesia UUD 1945 perubahan kedua, yaitu bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.[56]

Perkembangan kewenangan DPR dapat dijelaskan dalam dua periode yaitu:[57]

a. Masa Orde Baru (1966–1999)

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966–1971 yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:

[56] Reni Dwi Purmomowati,*Implementasi Sistem Biksameral Dalam Parlemen Indonesia* (Jakarta:Raja Gravindo Persada 2005) hal. 202
[57] http//:id.wikipedia.org di kutip 12 juli 2017

1) Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
2) Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
3) Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai "tukang stempel" kebijakan pemerintah yang berkuasa, karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah.

b. Masa reformasi (1999–sekarang)

Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. [58]

Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah

[58] Muhammad Amin Rais, selamatkan Indonesia,(yogjakarta: PPSK Press, 2008) hal 89

yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.[59]

DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekedar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.

Jadi uraian di atas dapat dipahami bahwa DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

2. Hak Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

[59] C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*...,hal.256-258

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proposional dengan daftar calon terbuka. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Keanggotaan DPR di resmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah dan janji.

Adapun DPR mempunyai Hak yang diatur Pasal 27 UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut:

a. Hak Interpelasi yaitu mengusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu partai. penyusunan hak interpelasi melaksanakan kebijakan pemerintah.
b. Hak angket (penyelidikan) adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting daan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selanjutnya kewajiban dari anggota DPR:[60]

a. Mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelangarakan pemerintah
d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
f. Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
g. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
h. Menaati kode dan peraturan tata tertib
i. Dan menjaga etika dan norma dalam hubungn kerja dengan lembaga yang terkait

Kewajiban seorang anggota DPR adalah sebagai lembaga pemerintah yang mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai lembaga yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia.

3. Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

Fungsi dan wewenang DPR bagai dua sisi mata uang yang berbeda (*two sides of coins*) yang dapat dibedakan tetapi tidak bisa terpisahkan, karena fungsi dan wewenang DPR tersebut dibentuk karena ada pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan negara. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang

[60] Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Politik…, hal.307*

berkedudukan sebagai lembaga negara. Adapun fungsi DPR diatur dalam pasal 25 UU No. 22 Tahun 2003 Tentang sususnan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut:

a. Legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang di bahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama
b. Anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
c. Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya.

Wewenang dan tugas DPR diatur dalam pasal 20 Undang-Undang No 22 Tahun 2003 yaitu:[61]

a. Membentuk Undang-Undang yang di bahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
c. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan.
d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak.
e. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD

[61] Reni Dwi Purmomowati, *Implementasi Sistem Biksameral Dalam Parlemen Indonesia…., hal. 206*

f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, serta kebijakan pemerintah.
g. Membahas dan minindaklanjuti hasil pengawasan yang di ajukan DPD terhadap pelaksaaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya lainya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan.
h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang di sampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
j. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
k. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang di ususlkan oleh Komisi Yudisial untuk di tetapkan oleh presiden sebagai Hakim Agung.
l. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, memerima penetapan duta besar negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
m. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dari mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan pembentukan undang-undang.
n. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR beradsal dari partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Dan adapun fungsi DPR antara lain membentuk UU, juga memiliki fungsi mengontrol APBN dan penguasaan atas jalannya UU. Dan DPR juga melaksanakan UU dan kehidupan demokrasi serta memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan perawakilan daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di provinsi/ kabupaten / kota di Indonesia. DPRD disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3: Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, Anggaran Pengawasan. [62]

1. Hak dan kewajiban DPRD

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Membedakan hak DPRD sebagi Institusi dengan hak anggota DPRD. Pembedaan itu di maksudkan agar ada kejelasan mana hak yang dapat dijalankan oleh anggota DPRD selaku Institusi. Dalam pasal 43 ayat

[62] http//:id.wikipedia.org dikutip pada 18 juli 2017

(1) UU ini dinyatakan bahwa DPRD mempunyai hak-hak yaitu: (a) Interplesi (b) Angket (c). Menyatakan pendapat.[63]

Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undang. Sementara hak DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 pasal 63 meliputi:

a) Hak Interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b) Hak Angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket.

Kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2003 pasal 65 :

a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
b. Melaksakan kehidupan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintah daerah.

[63] Ramlan Surbaki, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widiasadana Indonesia, 1999), hal. 54

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.
e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
f. Mendahulukkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
g. Memberi pertanggung jawaban atas tugas dan kinerja selaku sebagi anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab dan moral politis terhadap daerah pemilihnya.
h. Menaati kode etik, dan janji anggota DPRD, menjaga norma etika dalam menjaga hubungan kerja dan hubungan dengan lembaga lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anggota DPRD harus menaati peraturan di dalam kehidupan berdemokrasi, serta bisa terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan daerah.

2. Tugas dan wewenang DPRD

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD diatur dalam pasal 62 Undang-Undang No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai Tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut:

a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
c. Melaksanakan pengawasan terhadaap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan daerah

dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerja sama internasional daerah.

d. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
f. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
g. Meminta laporan keterangan pertangung jawaban kepada kepala daerah dalam penyelengaraan pemerintah daerah.
h. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah.
i. Memberikan persetujuan atas rencana kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Salah satu tugas dan wewenang DPRD sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaaan perda peraturan Perundang-undangan. Namun pada kenyataan tugas pengawasan yang dilakukan DPRD kurang optimal. Hal terlihat dari banyaknya perda yang berlaku di kehidupan masyarakat dengan tidak dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai dari mayarakat mengenai keberadaaan perda atau peraturan yang berlaku.

3. Fungsi DPRD

Fungsi DPRD juga diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 22 tahun 2003 sebagai berikut:

a. Legislasi adalah DPRD sebagai lembaga yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
b. Anggaran adalah DPRD lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pembntukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
c. Pengawasan adalah kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah

Fungsi DPRD sebagai lembaga kontrol yang terdapat di daerah, dalam hal ini sebagai fungsi di daerah dapat menciptakan kenyamanan sebagai lembaga pendengar aspirasi guna menciptakan masyarakat daerah yang lebih sejahtera.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Latar Belakang Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi

terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang mengusul PBNU hanya membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang di usulkan. Nama terbanyak yang di usulkan adalah Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.[64]

Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai yang bersama dengan puluhan partai baru lainnya. Partai ini didirikan pasca tergulingnya kekuasaan absolut Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Sebagaimana diketahui, kekuasaan otoriter Orde Baru telah mengerdilkan potensi politik rakyat dengan membatasi jumlah partai politik menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sepintas terbentuknya Partai Kebangkitan Bangsa memang berbau euforia politik setelah sekian lama di intervensi pemerintah dan kelompok yang berkuasa. Namun jika dilihat secara cermat, sesungguhnya lahirnya partai yang dibidani oleh NU ini merupakan konsekuensi logis dari suka duka panjang NU dalam perjalanannya.[65]

Kelahiran PKB diawali dari banyaknya aspirasi kuat dari golongan NU mengenai perlunya pendidikan politik bagi warga NU agar tidak terus menerus dimarjinalisasi oleh pemerintah dan rezim penguasa seperti yang terjadi selama

[64] Dokumen History Pendirian PKB

[65]Khoiruddin, *Menuju Partai Advokat* (Yogyakarta: LKIS Palangi Aksara, 2005), hal. 1-2

pemerintah orde baru. Banyak pendapat di kalangan warga NU yang menganggap bahwa posisi sebagai ”anak nakal terutama disimbolkan melalui figur KH. Abdurahman Wahid (GUSDUR) yang mengambil peran oposisi terhadap Soeharto.

Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, baik secara struktural maupun kultural, PKB mewarisi NU secara steruktural. Dalam organisasinya PKB memiliki dua institusi, yaitu Dewan Syura sebagai institusi penentu kebijakan dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksanaan kebijakan partai. Hal ini persis bagai mana yang ada di NU yakni lembaga Syuriah dan Tanfiziah. Secara kulturalpun PKB mengembangkan sikap kemasyarakatan sebagai mana yang dikembangkan NU, yakni sikap kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan yang bersumber pada hati nurani, dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wal wafa bil ahdi), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al’adalah), tolong-menolong dalam kebijakan (al-al’awun), dan konsisten menjalankan ketentuaan bersama (al-istiqamah).[66]

Kelahiran PKB sebagai masukan dan respon besar masyarakat mengundang kegembiraan bagi sebagian besar warga NU. namun tidak sedikit yang merasakan bahwa pada saat itulah awal dari pembangkangan besar terhadap khittah 1926 yang sangat diagung-agung kan. Meskipun PKB secara kelembagaan tidak ada sangkut pautnya dengan NU, Orang masih belum bisa melepaskan anggapan bahwa PKB adalah partai resmi NU. Inilah yang kemudian banyak

[66]Hasim Muzadi, *Membangun NU di Era Pasca Gusdur*, (Jakarta: Grasindo, 1999) hal 125

yang ditentang partai-partai Islam, terutama PPP, karena partai ini dulunya pernah berafiliasi dengan NU. Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa PKB muncul adalah atas kehendak dan usulan banyak warga NU. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol ada yang mengusulkan nama parpol. Nama terbanyak yang diusulkan antara lain Nahdlatul Ummah, kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.[67]

Selain nama, ada juga yang mengusulkan lambang parpol, Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah lambang bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk jadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semua nya. Salah satunya yang menjadi acuan adalah lajnah sebelas rembang yang diketuai KH.M.Cholil bisri dan PWNU Jawa Barat.

Semua usulan dan bahkan nama-nama yang diajukan ke PBNU mencirikan lambang NU. Selanjutnya tentang hubungan parpol baru dan NU dan siapa yang layak menjadi pengurus periode pertama juga diusulkan secara detil. Usulan yang paling lengkap adalah dari lajnah sebelas rembang, yang diketahui KH.M.Cholil Bisri dan PWNU, Jawa Barat. Sebelum usulan lajnah sebelas rembang masuk ke PBNU, sejumlah ulama dan tokoh NU berembuk dulu dikantor PWNU Jawa Timur, senin 25 mei 1998, empat hari setelah soeharto lengser.[68]

Mereka membahas berbagai kemungkinan seputar lahirnya partai baru di lingkungan NU. Pembahasan dilanjutkan pada, rabu 27 mei 1998, dan setelah

[67] http//: sejarah pendiriaan PKB.or.id
[68]Dokumen History Pendirian PKB

agak sempurna diumumkan pada acara istighotsah akbar 11 di lapangan Makodam Brawijaya, pada hari ahad, 31 mei 1998. Kemudian, agar lebih sempurna lagi, gagasan pendiri partai tersebut dibawa ke forum pertemuan ulama di rembang Jawa Barat, Sabtu 6 Juni 1998, Pada saat pertemuaan di Rembang inilah sebuah tim terdiri dari 11 orang berhasil menyelesaikan konsep pembentukan partai politik baru di lingkungan NU secara komprehensif. konsep itu kemudian di usulkan kepada PBNU atas nama Lajnah Sebelas Rembang.[69]

Atas dasar ini pula, para pemuka agama yang semula yang menganjurkan melakukan istighotsah, akhirnya merestui pendirian parpol di lingkungan NU. Sejak itu, tepatnya sehari setelah lengsernya Soeharto, PBNU (Pengurus besar Nahdaltul Ulama) kebanjiran usulan dari warga nahdiyin di seluruh pelosok tanah air agar mendirikan partai politik.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat nahdhiyin, PBNU menanggapinya secara berhati-hati. Hal ini karena hasil muktamar NU ke-27 di Situbundo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan warga NU. Banyak pihak dan kalangan warga NU tidak sabar bahkan menyatakan bahwa pendirian parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantaranya yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Perwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (perkanu) di Cirebon.

[69]Choirul Anam, *Dua Tahun PKB Jawa Timur*, (Surabaya: Bisma Satu, 2002), hal. 150

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk tim lima yang bertugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim lima diketuai oleh KH. Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/koordinator harian PBNU), dengan anggota, KH. Dawan Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Ketua Aam PBNU), H. M. Rozi Munir, SE, M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jendral PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, tim lima itu dibekali surat keputusan PBNU. Tim lima ini berikutnya menjadi wadah untuk membentuk partai politik sebagai penampung aspirasi politik warga NU.[70]

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja tim lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 juni 1998 memberi surat tugas kepada tim lima. Selain itu, dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin, H. M. Fachri Thaha Ma`rufin Lc., Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim asistensi bertugas membantu tim lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, serta membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.[71]

Pada tanggal 22 Juni 1998, tim lima dan tim asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 juni

[70]Hamad Ibnu, kontruksi realitas politik dalam media massa ,(Jakarta: Granit 2004) hal 100

[71]Firman Noor, Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2015), hal 25

1998 tim lima dan tim asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu pokok-pokok pikiran NU mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART, dan Naskah Deklarasi.[72]

Hasil tim inilah yang kemudian berwujud Partai Kebangkitan Bangsa yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di kediaman KH. Abdurrahman Wahid, Ciganjur, Jakarta Selatan. Sesuai harapan warga NU dan bangsa Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa diharapkan bersama komponen negara lainnya dapat membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mencapai cita-cita bangsa.[73]

Tanggal 23 Juli 1998 merupakan momentum yang tidak akan pernah terlupakan dan akan selalu dikenang sepanjang masa, khususnya bagi NU dan Partai Kebangkitan Bangsa, serta bagi warga Nahdhiyin dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada tanggal itulah para tokoh PBNU, yaitu KH. M. Ilyas Ruhiyat, KH. Moenasir Ali, KH. A. Muchith Muzadi, KH. Mustofa Bisri, dan tokoh yang tidak pernah terlewatkan, KH. Abdurrahman Wahid, bersama ulama dan tokoh NU lainnya mendeklarasikan PKB. Deklarasi tersebut merupakan puncak dari peran aktif PBNU membidani kelahiran PKB. Sejarah partai baru yang lahir dari rahim NU dimulai.[74]

Mengenai nama Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Dur dalam sambutannya pada deklarasi PKB mengatakan, kata kebangkitan jelas diambil dari kata

[72]Dokumen Naskah Deklarasi PKB, hal. 132-135
[73]Dokumen Histori Pendirian PKB.
[74] Dokumen Histori Pendirian PKB.

nahdalain dalam bahasa arab. Sesuai dengan undang-undang di negara Indonesia yang melarang penggunaan bahasa asing, nama partai ahkirnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, Kebangkitan. Sedangkan penamaan dan penyematan kata "Bangsa" tidak menggunakan kata-kata lain seperti "umat", menurut Gus Dur cukup sederhana; jangan-jangan nanti kalau menggunakan Partai Kebangkitan Umat, UU menetapkan lain, artinya tidak boleh menggunakan kata-kata berbahasa Arab.[75]

Selanjutnya, sebagai landasan perjuangan PKB di sektor struktural, dirumuskan *mabda siyasy* (titik tolak politik) dengan menggunakan *Fiqh siyasy* dalam bernegara, sebagaimana yang telah menjadi tradisi. Posisinya dengan NU, disampaing sebagai partai yang berdirinya difasilitasi oleh NU, PKB diharapkan merumuskan langkah-langkah ke depan yang nantinya lebih kepada upaya-upaya memberikan wadah bagi kalangan NU untuk berjuang pada lini struktural dengan berkecimpung dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, sedangkan NU dalam kerangkanya tetap berbasis pada gerakan yang bersifat kultural.

Kelahiran PKB memang tidak bisa dipisahkan dari tata aturan yang selama ini dipakai dan dipegang teguh serta menjadi landasan dalam tubuh NU. Namun, kelahiran PKB tetap bersifat profesional, dalam artian lahirnya partai politik yang bernama PKB tidak menyeret-nyeret regulasi ke-NU-an sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, tetapi sesuai dengan garis-garis pemikiran dan syarat berdirinya sebuah partai politk. NU hanya memediasiPKB seluas-luasnya

[75]Hamad Ibnu, kontruksi realitas politik dalam media massa ..., hal 101

dengan mengambil sikap serta menyediakan pangsa pasar dari orang-orang NU dengan tanpa mencampuradukkan keduanya.[76]

Apresiasi terhadap kelahiran PKB tidak lepas dari visi dan wacana keIslaman yang dikembaangkan NU. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU mempunyai pandangan keIslaman yang moderat, inklusik, dan toleran. Pandangan ini diharapkan mampu menjadi pilar bagi persatuan nasional di tengah masyarakat Indonesia yang plural. *Platform* politik Nu juga dibutuhkan untuk meredam merebaknya pandangan-pandangan keIslaman ekstrim yang masih menghendaki tegaknya *dawlah Islamiyah* di Indonesia. Di tengah gelombang antusiasme penyambutan lahirnya warga NU, PBNU merasa perlu mempertegas komitmennya atas *Khittah* yang telah dicanangkan sejak 1984. NU sebagai organisasi sosial keagamaan tetap tidak berpolitik, namun mempersilahkan warganya berkiprah politik praktis. PKB adalah wadah yang dipersiapkan untuk menampung aspirasi politik warga NU. Namun, agar tidak menbrak visi *khittah*, PBNU melarang perangkapan jabatan pengurus di semua tingkatan. Hubungan NU dan PKB tidak bersifat struktural, tetapi bersifat history, kultural dan aspiratif. Hubungan historis bearti setiap anggota dan aktivis PKB menyadari bahwa partai ini dirintis dan dilahirkan oleh sejumlah warga NU secara perorangan, sebagai wujud nyata kepedulian mereka terhadap masa depan kehidupan politik bangsa dan tekad untuk melaksanakan cita-cita politik NU mengangkat harkat dan martabat warganya. Keterikatan historis ini mengandung makna *dzikra*, yakni

[76]Muhaimin Iskandar, *PKB, Politik Rahmatan lil `AlaminDalam Sahar di Hasan et.al (ads) Memilih Partai Islam: Visi dan Persepsi.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal.17-18

peringatan yang selalu melekat dalam hati dan substansinya selalu menjiwai seluruh aktivitas politik anggota dan aktivis partai.[77]

Berlandaskan pada komitmen nasionalisme dan spritual agama, PKB dibentuk dengan tiga tujuan utama: (1) mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagai mana di tuangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (2) mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan bathin. material dan spritual, (3) mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlaqul karimah.[78]

Landasan, cita-cita dan sikap politik yang dimaksud adalah terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka dan berdaulat, yang menjamin hak-hak asasi warganya, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari segala bentuk penganiayaan, kebebasan dari pemaksaan agama, perusak keturunan serta kebebasan memiliki harta dan benda secara sah.[79]

Latar belakang lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa di kota Bukittinggi yaitu adanya putusan DPP PKB pusat untuk menetapkan perwakilan cabang di setiab daerah terutama di kota Bukittinggi. lahirnya berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di kota Bukittinggi lahir sebelum pemilu 2004. Pada saat itu caleg PKB belum bisa menetapkan wakilnya di DPRD kota Bukittinggi. Pada saat itu DPC PKB priode 2005-2011 dipimpin oleh Zulkarnain, kemudian pada priode 2011-

[77]A. Effendi Choirie, *Islam-Nasionalisme, UMNO-PKB Setudi Komporasi dan Deplomasi*, (Jakarta: Grafika Indah, 2008), h. 115

[78]Pasal 7 Anggaran Dasar PKB

[79]A. Effendi Choirie, *Islam-Nasionalisme, UMNO-PKB Setudi Komporasi dan Deplomasi..*, hal. 209

2016 dipimpin oleh Nurmanuri dan pada priode selanjutnya 2017-2022 dipimpin oleh Andre Kresna Saputra.[80]

2. Struktur Organisasi Partai kebangkitan Bangsa

Struktur organisasi PKB bersifat hierarkis, kewenangan, tugas, dan kewajiban pimpinan di tingkat pusat mengikat dan harus diikuti oleh kepemimpinan partai ditingkat yang lebih rendah darinya, Secara lebih rinci, struktur organisasi dan kepengurusan PKB adalah sebagai berikut :

a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat
b. Organisasi Daerah Tingkat I, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah
c. Organisasi Daerah tingkat II, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang
d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang
e. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, baik secara struktural maupun kultural PKB mewarisi NU, Secara struktural, PKB mengkopi struktur NU yang membagi kepemimpinan dalam dua lembaga, yaitu dewan Syura sebagai penentu kebijakan umum dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksana kebijakan partai. Format ini persis seperti struktur kepemimpinan NU dimana syuriah memegang kepemimpinan *jami`iyah* yang dilaksanakan oleh pengurus harian yang disebut tanfidziyah, jika di NU otoritas ulama ditentukan melalui lembaga syuriah, di PKB diwadahi dalam Dewan Syura.

Sedangkan Susunan Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa kota Bukittinggi priode Tahun 2017- 2022

[80]Yasir, sekretariat DPC PKB Bukittinggi, wawancara pribadi 25 Januari 2018

Dewan Syura

Ketua **:** Maswardi Chan

Sekretaris : Sariman

Wakil sekretaris : Herman Jailani

Dewan Tanfidz

Ketua : Andre Kresna Saputra S.Sos

Wakil ketua : Jefri Kaulana

Wakil ketua : Amri Darwis

Sekretaris : Syahrul

Wakil sekretaris : Deni Calter, S,T

Wakil sektretaris: Dance, A.MK

Bendahara : Suryati

Wakil Bendahara: Dewi Filta

Selanjutnya kepengurusan Rekapitulasi Pimpinan Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa

No	Kecamatan	Nama	Jabatan
1	Mandiangin koto selayan	Suyerman, S.Sos Riki Saputra Ananda Silfia Rully Hidayat Fitrianti	Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Dewan tahfiz
2	Guguk Panjang	Abd Racman	Ketua

		Lian Mesri Riddo Junaidi Niko Saputra Gunawan	Wakil ketua Sekretaris Bendahara Dewan tahfiz
3	Aur Tigo Baleh	Jumadi Andi Candra Rahmat Novri Hendra Susianti	Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara Dewan tahfiz

Sumber: Musyawarah Susunan Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa kota Bukittinggi 16 Oktober 2016 .

B. Faktor Penyebab Minim Keterwakilan Partai Kebangkitan Bangsa DI kota Bukittinggi

Kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa di kota Bukittinggi merubah suasana dalam pemilu legislatif. Namun demikian Partai Kebangkitan Bangsa di kota Bukittinggi belum berhasil menghantarkan salah satupun calegnya untuk duduk jadi anggota legislatif kota Bukittinggi. Partai Kebangkitan Bangsa sudah mengajukan caleg sejak pemilu 2004. Pada tahun 2009 juga mengajukan calonnya namun tidak cukup suara untuk bisa duduk di DPRD kota Bukittinggi. Pada pemilu legislatif tahun 2014 Partai Kebangkitan Bangsa juga hanya mengantarkan satu calegnya sebagai anggota legislatif kota Bukittinggi.

Faktor-fakor yang mempengaruhi minimnya keterwakilan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai baru di Kota Bukittinggi

Menurut Andre Kresna Saputra sebagai ketua DPC PKB kota Bukittinggi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di kota Bukittinggi tidak begitu diketahui. Akan tetapi partisipasi PKB sudah dimulai sejak awal pemilu tahun 2004. Partai Kebangkitan Bangsa berdiri pada tahun 2004 dan berpartisipasi dalam pemilu 2009. Dalam pemilu 2009 PKB mengutus 8 calon untuk ikut dalam pemillu yang tersebar dibeberapa kecamatan di Bukittinggi, Pada saat pemilu 2009 tersebut calon legislatif tidak mendapatkan suara untuk duduk di DPRD kota Bukittinggi.[81]PKB dikatakan baru di Bukittinggi baru menempatkan satu wakilnya di Bukittinggi, dan pergerakan awal partai yang baru dikenal oleh masyarakat kota Bukittinggi.

2. Loyalitas kepemimpinan yang kurang

Menurut Yasir sebagai Sekretariat PKB kota Bukittinggi. pada priode 2011-2016 kepemimpinan PKB terdapat kesalahan dimana pergerakan partai tersebut yang tidak berjalan baik, karena kepemimpin hanya memikirkan kepentingan mencalonkan diri dibandingkan memberikan pergerakan partai.[82]

Loyalitas caleg sangat dibutuhkan, loyalitas seorang caleg akan mempengaruhi suaranya supaya caleg tersebut bisa duduk di DPRD. Loyalitas kepemimpinan yang kurang akan mengakibatkan struktur dalam partai juga akan berkurang. Jadi loyalitas seorang pemimpin juga jadi keharusan seorang pemimpin didalam partai.

---

[81] Andre Kresna Saputra , Ketua DPC PKB , Wawancara pribadi, Rabu 15 November 2017

[82] Yasir, Sekretariat DPC PKB, Wawancara pribadi, Rabu 15 November 2017

3. Loyalitas caleg yang rendah

Menurut Syahrul Sos sebagai sekretaris DPC kota Bukittinggi. Loyalitas terhadap partai dibutuhkan karena dalam pemilu hal ini sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi loyalitas seorang caleg maka semakin tinggi simpatik dan partisipasi pemilih dan semakin rendah loyalitas seorang caleg maka semakin rendah partisipasi pemilih. Seharusnya bagi setiap caleg yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan mempunyai power dalam merangkul masyarakat. Figur seorang caleg sangat dituntut supaya pemilih tidak ragu dalam memilih seorang pemimpin. Adapun bentuk-bentuk loyalitas caleg itu adalah: [83]

b. Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif
c. Memiliki pengabdian danrekam jejak yang baik selama aktif di Partai Kebangkitan Bangsa
d. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela
e. Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang

Dari pandangan salah satu Bendahara DPC PKB Bukittinggi Suryati menyatakan bahwa figur seorang caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa sebelumnya itu, tidak mampu menampilkan figur yang mampu menarik suara masyarakat kota Bukittinggi. Itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minimnya keterwakilan Partai Kebangkitan Bangsa Di Bukittinggi.[84]

4. Pemikiran pemilih yang sudah maju

[83] Syahrul, Sekretaris DPC PKB , Wawancara pribadi, Kamis 16 November 2017
[84] Suryati, Bendahara DPC PKB , Wawancara pribadi, Selasa 5 Desember 2017

Andre Kresna Saputra juga mengatakan pemikiran masyarakat yang modern juga mempengaruhi minimnya keterwakilan di DPRD Kota Bukittinggi. Seiring perkembangan zaman maka pemikiran masyarakat juga berkembang. Hal tersebut terbukti, jika pada masa orde baru orang memilih partai politik tetapi sekarang masyarakat memilih siapa orang yang berpolitik. Partai Kebangkitan Bangsa sepatutnya mampu untuk membaca pola pikiran pemilih di kota Bukittinggi, supaya PKB bisa eksis di kota Bukittinggi.[85]

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat pun selektif dalam melakukan dan bertindak dalam memutuskan sesuatu. Masyarakat sekarang melihat bakal calon pemimpin ialah dari kesuksesan partai tersebut menarik hati masyarakat. Masyarakat melihat pemimpin yang duduk di pemerintahan adalah yang benar-benar mendengar aspirasinya, bukan pemimpin yang hanya menebar janji tapi tidak pernah menepati janji-janjinya.

5. Kurangnya pendekatan caleg PKB

Dalam kampanye pemilu 2014 caleg PKB kurang mendekati masyarakat dan kurang memberikan pendekatan tentang program PKB yang akan memberikan bukti nyata kepada masyarakat Bukittinggi. Menurut Hafrizal caleg PKB salah satu kendala yang menyebabkan sedikitnya caleg dari PKB di DPRD kota Bukittinggi adalah kurangnya pendekatan terhadap masyarakat tentang program dan bukti nyata apabila caleg PKB terpilih sebagai anggota legislatif. kurangnya pendekatan caleg yaitu dikarenakan caleg tersebut hanya

[85] Andre Kresna Saputra , Ketua DPC PKB , Wawancara pribadi, Rabu 15 November 2017

menyampaikan program kerja tidak menyampaikan apa yang juga dilakukan partai tehadap masyarakat kota Bukittinggi [86]

Kurangnya pendekatan caleg terhadap masyarakat yaitu karena bakal caleg hanya mendekati masyarakat ketika akan pemilu saja, dan hanya memaparkan gambarnya, terkadang masyarakat ingin melihat sosok calon yang benar-benar apa yang di butuhkan masyarakat tersebut.

Dari sudut pandangan tokoh masyrakat yaitu Bapak Aidil Alfin mengatakan "Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai Islam masih tetap, kadang kala masyarakat masih percaya dengan partai yang biasa di pilih pada pemilu sebelumnya. Kenapa PKB hanya menetapkan satu wakilnya di DPRD itu karena masyarakat masih memandang kalau PKB itu kental dengan kejawaan. Sedangkan masyarakat Bukittinggi kental dengan adat istiadat minangkabau. [87]

Selanjutnya menurut Edi Rosman dalam pola fikir masyarakat Bukittinggi bahwa partai Islam sudah menunjukkan kemajuan di kota Bukittinggi, tetapi pada Partai Kebangkitan Bangsa sendiri menempatkan satu wakilnya di DPRD. Hal itu disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap PKB masih kental dengan kejawaan, itu yang menyebabkan keterwakilkan Partai Kebangkitan Bangsa hanya menetapkan satu wakilnya di DPRD kota Bukittinggi. Hal lain yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada PKB adalah

[86]Hafrizal, Caleg PKB, Wawancara pribadi, senin 18 Desember 2017
[87] Aidil Alfin, Ketua MUI Bukittinggi, wawancara pribadi,Senin 11 Desember 2017

karena masyarakat kurang mengetahui keadaan partai yang hanya maju di daerah Jawa [88]

Penulis juga mengkaji pandangan masyarakat tentang keterwakilan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD kota Bukittinggi. Dalam pandangan salah satu masyarakat yaitu Guswarti mengatakan kenapa pada saat pemilu tidak memilih caleg PKB Pada saat pemilu 2014 adalah saya tidak melihat caleg tersebut datang ke daerahnya untiuk berkampanye dan mengenalinya di masyarakat, dan saya hanya melihat caleg lain pada pemilu DPRD Bukittinggi.[89]

Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab masyarakat kota Bukittinggi tidak berpartisipasi dan simpatik untuk memilih Partai Kebangkitan Bangsa adalah karena Partai Kebangkitan Bangsa yang baru dan kepimpinan PKB sebelunya yang kurang solid. Selain itu Partai Kebangkitan Bangsa kurang memperhatikan basis dukungan dan simpatisan yang mengakibatkan PKB gagal dalam mengayomi masyarakat kota Bukittinggi.

C. Upaya Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan partisipasi politiknya di Bukittinggi

Pemilihan umum legislatif di Kota Bukittinggi merupakan pemilu untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat yang akan menduduki kursi DPRD, Tugas pertama para calon legislatif adalah mencari dukungan masyarakat untuk dapat memenangkan dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pentas demokrasi yang berskala Nasional di Indonesia, dimana pada tahun 2014 dilaksanakan dua

[88]Edi Rosman , Tokoh Masyarakat , Wawancara pribadi,selasa 19 desember 2017

[89] Guswarti , Masyarakat , wawancara pribadi, Senin 11 Desember 2017

Pemilihan Umum, yaitu Pileg dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu inilah terlihat pertarungan yang sesungguhnya oleh masing-masing partai untuk memperoleh kursi DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu dimana seluruh masyarakat di Indonesia secara bersama-sama memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan mereka yang akan menduduki kursi DPR, DPD, DPRD dan memilih siapa yang akan memimpin Negara ini untuk masa lima tahun ke depan. Kota Bukittinggi pun ikut serta memeriahkan pentas demokrasi skala Nasional tersebut. Berbagai macam cara dan strategi yang di siapkan oleh caleg PKB Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk perolehan suara dan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bukittinggi.

Upaya Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bukittinggi dalam mencari dukungan dari masyarakat dan meningkatkan wakilnya di DPRD kota Bukittinggi. Dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu:

1. Membuka kantor DPC PKB baru

Salah satu program Partai Kebangkitan Bangsa yaitu akan membuka kantor DPC baru, dimana pada saat ini kantor yang berada Jln. Umar ghafar no.2 Tangah Sawah akan berakhir sewa kantornya. Andre Kresna Saputra sebagai ketua DPC PKB kota Bukitttinggi mengatakan " dalam program Partai Kebangkitan Bangsa akan membuka kantor baru pada tahun depan, seiring dengan pada tahun 2019 akan diadakan pemilu Presiden dan Caleg, kantor baru yang akan berada di tempat strategis diharapkan menampung aspirasi masyarakat dan

sebagai lembaga komunikasi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengembangan politik Partai Kebangkitan Bangsa di Bukittinggi. Kantor yang baru akan dibuka di daerah Mandiangin " [90]

Kantor baru yang letaknya strategis ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKB dan memudahkan informasi dan kominikasi. Disamping itu program utama yang akan dirancang adalah "upaya untuk meningkatkan loyalitas kepemimpinan pada Partai Kebangkitan Bangsa, dan membuka kemimpinan yang solid sehingga dapat bersaing dengan partai lain sehingga PKB dapat meningkatkan wakilnya di DPRD kota Bukittinggi." [91]

Syahrul sekretaris DPC PKB baru juga menaruh harapan pada kepemimpinan yang baru untuk bergerak cepat dalam menampung aspirasi masyarakat."saya berharap pada kepemimpinan pada saat ini harus benar-benar menampung dan mencari apa yang dibutuhkan masyarakat Bukittinggi. Dan bergerak cepat dalam meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Partai Kebangkitan Bangsa." [92]

Pada kepemimpinan partai loyaitas harus benar-benar dipertaruhkan karena kepemimpinan tersebut yang akan menjalankan program yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Langkah - langkah yang dilakukan pengurus partai untuk meningkatkan loyaslitas partai:

2. Peningkatan Loyalitas dan kualitas caleg

[90]Andre Kresna Saputra , Ketua DPC PKB , Wawancara pribadi, Rabu 15 November 2017

[91]Andre Kresna Saputra , Ketua DPC PKB , Wawancara pribadi, Rabu 15 November 2017

[92] Syahrul , Sekretaris DPC PKB , Wawancara pribadi, Kamis 16 November 2017

Caleg adalah salah satu figur dalam menentukan apakah caleg partai tersebut mampu dan berkualitas untuk memimpin dan menyampaikan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif di daerah.

Andre kresna saputra menyampaikan tentang caleg yang akan tampil pada pemilu 2019: "pada saat ini telah dibuka pendaftaran caleg yang akan naik pada pemilihan caleg 2019, saya akan benar-benar menekankan pada caleg tersebut untuk benar memberikan yang terbaik dalam meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Karena pada saat kampanye nanti calon legislatif akan memberikan pengarahan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa yang akan memenuhi janji yang sesunggunya kepada masyarakat."[93]

Langkah-langkah yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan loyalitas caleg:

a. Memilih bakal calon yang mampu menaikkan popularitas Partai Kebangkitan Bangsa yang mampu memberikan janjin yang benar kepad masyarakat
b. Meningkatkan kualitas pendidikan calon yang akan menjadi calon legislatif
c. Menseleksi bagaimana calon tersebut melakukan kampanye keoada masyarakat

3. Pendekatan pemilih pemula

Salah satu upaya yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa adalah dengan mendekati pemilih pemula yang jumlahnya banyak di Bukittinggi, menurut Suryati "salah satu upaya yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa adalah mendekati pemilih pemula di Bukittinggi, karena pemilih pemula cukup

[93] Andre Kresna Saputra , Ketua DPC PKB , Wawancara pribadi, Rabu 15 November 2017

banyak ini adalah salah satu cara dalam meningkatkan dalam pemilihan caleg pada tahun 2019".[94]

Selanjutnya Jon Mai Hendri salah satu caleg PKB pada pemilu sebelumnya mengatakan, "bahwa kekalahan saya pada pemilu sebelumnya adalah kurang mendekati pemilih pemula di Bukittinggi. Di Bukittinggi pemilih pemula yang cukup banyak ini adalah upaya saya untuk meningkatkan suara pada pemilu berikutnya"[95]

Langkah-langkah yang di lakukan Partai Kebangkitan Bangsa dalam mendekati pemilih pemula yaitu:[96]

a. Mendata berapa banyak pemilih pemula yang ada di Bukittinggi
b. Terjun langsung kemasyarakat dan memberikan pengarahan kepada pemilih pemula
c. Mengumpulkan kaum muda dan mendekati ketua pemuda setempat dan memberikan pengarahan tentang Partai Kebangkitan Bangsa.

Menurut penulis pendekatan pemilih pemula di Bukittinggi adalah upaya yang sangat efektif karena pemilih pemula yang banyak dapat memberi kontribusi yang baik bagi caleg maupun bagi Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri.

4. Kampanye door to door

Kampanye merupakan salah satu upaya yang dilakukan partai dalam meningkatkan partisispasi supaya bisa duduk di legislatif. Seketeriat PKB Yasir mengatakan "untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengenalan lebih

[94] Suryati, Bendahara PKB, Wawancara pribadi, Selasa 5 Desember 2017
[95] Jon Mai Hendri , Anggota PKB, Wawancara pribadi, Senin 25 November 2017
[96] Yasir , seketariat PKB , Wawancara Pribadi, Kamis 25 Januari 2018

jauh PKB akan datang ke rumah masyarakat untuk pengenalan Partai Kebangkitan Bangsa, Caleg PKB akan memberikan pengarahan tentang Partai Kebangkitan Bangsa dan programnya dalam meningkatkan kinerjanya bila nanti jadi wakil di DPRD Bukittinggi dan memenuhi apa yang diinginkan masyarakat Bukittinggi" [97]

Cara yang dilakukan partai kebangkitan bangsa dalam melakukan kampanye door to door adalah:[98]

a. Datang langsung kerumah masyarakat dan memberikan pengarahan tentang keunggulan Partai Kebangkitan Bangsa
b. Membuat program kegiatan yang berhubungan dengan sosial masyarakat
c. Mendatangi masjid dan mengajak masyarakat untuk musyawarah, dan menyerap apa yang diinginkan masyarakat di daerah tersebut

Dalam pandangan partai lain dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu bapak Saiful Efendi sebagai anggota DPRD dari fraksi PKS mengatakan "bahwa keterwakilan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD kota Bukittinggi sudah meningkat. Wakil dari PKB yaitu bapak Andre Kresna Saputra juga menjadi wakil termuda dibandingkan wakil yang lainya.[99]

Pandangan Aidil Alfin sebagai MUI kota Bukittinggi, seharusnya Partai Kebanagkitan Bangsa memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa PKB tidak hanya mencari dukungan kepada masyarakat yang hidup di kehidupan dimana seorang caleg itu berada atau karena bakal calon tersebut memiliki

[97] Yasir , Sekretariat DPC PKB, Wawancara pribadi, Rabu 15 November 2017
[98] Yasir , Sekretariat DPC PKB, Wawancara pribadi, Kamis 25 Januari 2018
[99] Saiful Efendi ,Fraksi PKS, wawancara, selasa 22 November 2017

komunitas sendiri yang meyebabkan ia duduk di DPRD Kota Bukittinggi. PKB harusnya melakukan pendekatan kepada masyarakat luas karena dengan itu PKB lebih dikenal dan dapat meningkatkan wakilnya di DPRD kota Bukittinggi.[100]

Dari pandangan Azwar Azmi st Pangeran tokoh masyarakat mengatakan bahwa caleg PKB harus lebih mengenalknan diri kepada masyarakat bukan hanya pada saat pemilu saja tetapi harus mengenalkan diri sebelum pemilu. Karena dilihat Caleg PKB lebih cendrung lebih dekat pada saat pemilu saja. Kedekatan Caleg dengan masyarakat itu akan lebih bisa meyakinkan masyarakat untuk mempercayainya menjadi wakilnya di DPRD kota Bukittinggi.[101]

Dalam pandangan Edi Rosman mengatakan untuk kemajuan PKB kedepan seharusnya lebih mendekatkan kaum muda untuk meningkatkan wakilnya di DPRD. Karena banyaknya pemilih pemula di kota Bukittinggi akan meniggkatkan wakilnya dan kepercayaan masyarakat di kota Bukittinggi.[102]

Caleg yang berkompeten akan mampu mempengaruhi masyarakat dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Biasanya caleg atau kader yang berkompoten akan didukung sepenuhnya oleh partai dan partai akan memprioritaskan mereka tersebut untuk dipilih masyarakat.

[100] Aidil Alfin, Ketua MUI Bukittinggi, wawancara pribadi,Senin 11 Desember 2017
[101] Azwar Azmi, Tokoh Masyarakat, wawancara pribadi,Senin 4 Desember 2017
[102] Edi Rosman , Tokoh Masyarakat , Wawancara pribadi,selasa 19 desember 2017